Vol. 4, No. 3, September 2025
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

Masyarakat Sipil dan Politik Bersih: Studi Peran Malang Corruption Watch (MCW) dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas di Kota Malang

Micheel Dime Evelyna Salsa Bila[(1)*], Ratna Duhita[(2)], Satya Robbi Pratama[(3)], Tsania Mufarichah[(4)], Vika Nur Adilla[(5)], Sri Untari[(6)]
[1,2,3,4,5,6] S1 PPKN, Universitas Negeri Malang, Malang, 65145, Indonesia
Email : tsania.mufarichah.2407116@students.um.ac.id, Surel: sri.untari.fis@um.ac.id

ABSTRAK

Sistem demokrasi, keberadaan masyarakat sipil memegang peran penting sebagai pengawas jalannya pemerintahan dan penyeimbang kekuasaan negara. Peran mereka menjadi sangat penting dalam menjaga transparasi, akuntabilitas, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi. Malang Corruption Watch (MCW) adalah organisasi masyarakat sipil yang didirikan pada tahun 1999 sebagai respon terhadap maraknya korupsi pasca-reformasi 1998, dengan motivasi utama mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Lembaga ini aktif dalam mengawal isu-isu transparasi, partisipasi publik, dan pemberantasan korupsi di Kota Malang. Metode Penelitian yang digunakan dalam membuat artikel ini, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis secara mendalam peran Malang Corruption Watch (MCW) sebagai organisasi masyarakat sipil dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Kota Malang. metode ini peneliti memperoleh perspektif yang otentik dari pengurus langsung yang terlibat dalam gerakan anti korupsi, sehingga data yang dihasilkan tidak hanya deskriptif tetapi juga kaya akan konteks operasional dan dinamika lokal.

Kata kunci: Malang Corruption Watch (MCW); masyarakat sipil; gerakan anti korupsi.

ABSTRACT

In a democratic system, civil society plays an important role as a watchdog of the government and a counterweight to state power. Their role becomes very important in maintaining transparency, accountability, and realizing governance that is clean from corrupt practices. Malang Corruption Watch (MCW) is a civil society organization established in 1999 as a response to the rise of corruption after the 1998 reforms, with the main motivation of realizing a transparent and accountable government. This organization is active in guarding issues of transparency, public participation, and eradicating corruption in Malang City. The research method used in making this article, which is using a qualitative approach with a case study method to analyze in depth the role of Malang Corruption Watch (MCW) as a civil society organization in encouraging government transparency and accountability in Malang City. This method allows researchers to obtain authentic perspectives from direct administrators involved in the anti-corruption movement, so that the resulting data is not only descriptive but also rich in operational context and local dynamics.

Keywords: Malang Corruption Wach (MCW); civil society; anticorruption.

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
06.07.2025	16.06.2025	25.09.2025	30.09.2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Dalam sistem demokrasi, keberadaan masyarakat sipil memegang peran penting sebagai pengawas jalannya pemerintahan dan penyeimbang kekuasaan negara. Masyarakat sipil merupakan kumpulan organisasi dan individu yang secara sukarela berpartisipasi dalam kehidupan publik tanpa terikat langsung pada stuktur kekuasaan negara (Ulzikri, 2020). Peran mereka menjadi sangat penting dalam menjaga transparasi, akuntabilitas, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi. Salah satu bentuk nyata dari gerakan masyarakat sipil di Indonesia adalah keberadaan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mana berfokus pada isu-isu anti korupsi, seperti Malang Corruption Watch (MCW).

Malang Corruption Watch (MCW) adalah organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam mengawal isu-isu transparasi, partisipasi publik, dan pemberantasan korupsi di Kota Malang. Lembaga ini telah menjadi representasi nyata dari partisipasi masyarakat dalam membangun sistem politik yang lebih bersih dan akuntabel. Melalui berbagai kegiatan seperti riset, advokasi, pendidikan publik, hingga kampanye anti korupsi, Malang Corruption Watch (MCW) tidak hanya melakukan advokasi dan riset, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat agar lebih aktif terlibat proses pengawasan pemerintah. Selain itu, MCW juga menjalin kerja sama dengan berbagai elemen masyarakat dan media lokal untuk memperluas jaringan dalam mendorong perubahan.

Keberadaan MCW menjadi sangat penting terutama di tengah maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik di daerah, termasuk Kota Malang. Dengan pemantauan anggaran, investigasi kasus, dan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat, MCW berusaha menciptakan budaya politik yang bersih dan berintegritas. Aktivitas ini menjadi bentuk nyata dari kekuatan masyarakat sipil dalam mendobrak praktik-praktik korupsi yang selama ini dianggap biasa atau sulit diberantas. MCW tidak hanya bekerja dalam ranah teknis, tetapi juga mengedukasi masyarakat agar sadar akan hak-hak politiknya dan berani bersuara terhadap ketidakadilan.

Studi ini penting karena beretujuan untuk memahami bagaimana peran masyarakat sipil seperti MCW bisa menjadi bagian dari solusi terhadap permasalahan politik yang tidak bersih. Selain itu, artikel ini juga ingin mengangkat nilai-nilai demokrasi partisipatif yang seringkali kurang mendapat perhatian, padahal keberhasilannya sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif warga negara. Dengan mempelajari peran MCW, mahasiswa dan masyarakat umum diharapkan bisa lebih peka terhadap isu-isu pokitik lokal dan mengambil bagian dalam proses perbaikan sistem. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan masyarakat sipil bukan hanya pelengkap dalam sistem demokrasi, melainkan menjadi elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang jujur dan bertanggung jawab.

Lebih dari pengawasan, MCW juga memainkan peran dalam membangun jaringan solidaritas antikorupsi dikalangan pemuda, mahasiswa, dan komunitas lokal. Ini membuktikan bahwa upaya menciptakan politik bersih tidak bisa hanya mengandalkan institusi formal seperti KPK atau aparat penegak hukum, tetapi memerlukan dukungan dari akar rumput. Melalui pendekatan yang berbasis komunitas ini, MCW menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab dan partisipasi sejak dini. Pendekatan ini dinilai efektif untuk membangun kesadaran kolektif bahwa korupsi adalah musuh bersama yang harus dilawan dengan cara yang sistematis dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam membuat artikel ini, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis secara mendalam peran Malang Corruption Watch (MCW) sebagai organisasi masyarakat sipil dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Kota Malang. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti ini dipilih karena mampu mengeksplor lebih jauh bagaimana peran Malang Corruption Watch (MCW) dalam konteks politik lokal, termasuk strategi dukungan yang diberikan kepada masyarakat, hambatan, dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan salah satu pengurus Malang Corruption Watch (MCW) yaitu Kak F, untuk menggali secara langsung

pengalaman, strategi, dan tantangan dan akuntabilitas di Kota Malang. Wawancara semiformal ini berfokus pada beberapa aspek yang kami tekankan, seperti mekanisme pengawasan anti-korupsi yang diterapkan Malang Corruption Watch (MCW), contoh kasus yang pernah ditangani, kolaborasi dengan pemerintah atau masyarakat sipil, serta hambatan yang dihadapi. Proses wawancara berlangsung di kantor Malang Corruption Watch (MCW) dengan durasi sekitar 2 jam kemudian di rekam yang tentunya sudah mendapat izin dari narasumber kami dan di transkrip untuk kami analisis lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Malang Corruption Watch (MCW) dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Di Kota Malang

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pengurus Malang Corruption Watch (MCW), penelitian ini mengungkap peran strategis organisasi masyarakat sipil ini dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih di Kota Malang. Malang Corruption Watch (MCW) didirikan pada tahun 1999 sebagai respons terhadap maraknya korupsi pasca-Reformasi 1998, dengan motivasi utama mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sejak didirikan MCW telah memfokuskan diri, pada tiga bidang utama :

A) Pengawasan transparansi pemerintahan

Pengawasan transparansi pemerintahan. MCW secara aktif melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, terutama dalam hal anggaran dan implementasi kebijakan daerah. Melalui riset, investigasi warga, dan pemantauan terhadap APBD, MCW berusaha untuk memastikan jalannya pemerintahan Malang Raya dapat berjalan sesuai dengan semestinya.

B) Pembentukan forum warga mandiri untuk pengawasan kebijakan

Pembentukan forum warga mandiri untuk pengawasan kebijakan. Melalui forum-forum warga yang telah dibentuk, MCW memberikan pelatihan kepada masyarakat agar dapat membantu mengawasi jalannya pemerintahan kota Malang demi mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih. Hal ini dilakukan agar masyarakat ikut andil menjadi aktor pengontrol jalannya pemerintahan. Selain itu, forum warga ini juga digunakan untuk menyuarakan terkait usulan kebijakan yang berdampak pada publik.

C). Pemantauan anggaran publik seperti APBD dan laporan BPK

Pemantauan anggaran publik seperti APBD dan laporan BPK. Setiap 1 bulan sekali, MCW rutin melakukan audit terhadap APBD Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Jika didalam pemeriksaan tersebut terbukti terdapat penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran maka akan dilakukan tindakan berupa pelaporan terhadap pihak yang berwenang untuk ditangani.

Salah satu dampak nyata peran MCW terlihat dalam kasus korupsi mantan Wali Kota Malang, Moch. Anton, pada tahun 2018. MCW terlibat aktif dalam pengawasan perubahan APBD Kota Malang, yang kemudian menjadi dasar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kolaborasi antara MCW dan KPK ini tidak hanya berhasil menjerat Anton, tetapi juga 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang, menunjukkan efektivitas pengawasan masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi.

MCW mengandalkan tiga sumber utama dalam mengumpulkan informasi publik :

a) Media massa dan jaringan jurnalis

Media massa dan jaringan jurnalis. Media massa menjadi salah satu sumber utama yang digunakan oleh MCW dalam memantau dinamika sosial-politik. MCW juga bekerja sama dengan beberapa jurnalis dalam memperoleh informasi yang akan digunakan dalam melakukan pemantauan. Dengan berkolaborasi seperti ini, MCW dapat mengakses informasi dengan lebih cepat dan akurat.

b) Analisis dokumen resmi seperti APBD, dan

Analisis dokumen resmi seperti APBD. Kemudian, sumber informasi yang kedua berasal dari dokumen-dokumen milik pemerintah seperti APBD. MCW dengan rutin melakukan

kajian terhadap dokumen-dokumen tersebut guna mengawasi jalannya kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan kajian ini, MCW dapat mengidentifikasi tanda-tanda penyelewengan dan penyalahgunaan anggaran.

c) Aduan langsung dari masyarakat, melalui investigasi lapangan.

Aduan langsung dari masyarakat, melalui investigasi lapangan. MCW juga menggunakan aduan masyarakat sebagai salah satu sumber informasi. Dengan masyarakat yang terdampak langsung akan kebijakan yang tidak adil ini, MCW akan lebih mudah dalam melakukan identifikasi masalah yang terjadi. MCW juga memberikan ruang bagi masyarakat yang ingin melaporkan permasalahan terkait kebijakan yang terjadi dengan berbagai kanal, sepereti posko weuan, media sosial MCW, dan melaporkan langsung kekantor MCW.

Mekanisme ini memungkinkan MCW mengidentifikasi kasus-kasus korupsi secara cepat, seperti ketidakadilan dalam sistem PPDB atau pembayaran insentif penggali kubur selama pandemi Covid-19.

Kolaborasi yang dilakukan MCW juga menjalin hubungan dengan pihak yang berkepentingan juga menjadi kunci keberhasilan MCW. Organisasi ini menjalin kemitraan dalam segi formal melalui MoU dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan juga universitas, serta kerja sama informal dengan kelompok masyarakat. Sinergi ini bisa memperkuat posisi MCW sebagai pengawas independen yang memiliki kredibilitas kuat di tingkat lokal. Meski memiliki dampak signifikan, MCW menghadapi tantangan berat, termasuk tekanan dari aparat keamanan, keterbatasan kapasitas masyarakat dalam memahami hak politik, dan sikap apatis sebagian warga yang lelah dengan janji perubahan. Namun, MCW mencatat kemajuan dalam membangun kesadaran kolektif, terutama di bidang kesehatan, dimana mereka berhasil mendorong implementasi Universal Health Coverage (UHC) oleh Pemerintah Kota Malang.

Keberhasilan gerakan MCW diukur melalui indikator seperti pembentukan forum warga dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan kasus-kasus lokal. Melalui pendekatan kasuistik, seperti pendampingan warga dalam kasus sengketa sertifikasi tanah (PTSL), sudah bisa menjadi bukti bahwa perubahan budaya politik dapat dimulai dari tingkat bawah.

Temuan penelitian ini diperkuat dengan adanya teori tentang peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memperkuat *civil society* yang mandiri dan demokratis (Hikam, 1999 dan Gaffar, 2002). Dari studi kasus Malang Corruption Watch (MCW) menunjukkan bahwa pengawasan melalui masyarakat tidak hanya efektif dalam mengungkap korupsi, tetapi juga dalam menciptakan mekanisme kontrol yang berkelanjutan. Namun, tantangan seperti penolakan birokrasi dan apatisme masyarakat, yang artinya perlu adanya pendekatan yang lebih inklusif, termasuk edukasi politik dan penguatan kapasitas warga.

Dengan demikian, Malang Corruption Watch (MCW) merupakan contoh nyata bagaimana LSM dapat berfungsi sebagai pilar *civil society* yang kritis terhadap penyimpangan kekuasaan, sekaligus menjadi mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan partisipatif. Meski masih diperlukan upaya sistematis untuk memperluas dampaknya ke sektor-sektor lain seperti pendidikan dan pelayanan publik.

Lebih jauh, temuan penelitian ini mengungkap bahwa efektivitas MCW dalam mendorong transparansi pastinya tidak terlepas dari pendekatan "*bottom-up governance*" yang mereka terapkan. Dengan membentuk forum warga dan mengembangkan mekanisme pengaduan masyarakat, MCW berhasil menciptakan sistem check and balances di tingkat akar rumput. Kasus sukses MCW dalam mendorong implementasi Universal Health Coverage (UHC) menunjukkan bagaimana tekanan berbasis bukti yang sistematis dapat mempengaruhi kebijakan publik.

Lebih lanjut, NGO seperti MCW

Indonesia Corruption Watch (ICW) merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang berperan dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih. Berdiri sejak Mei 1998, ICW lahir untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bebas korupsi pada masa pelengseran presiden Soerhato. ICW juga memiliki keinginan yang sama dengan MCW yaitu, membumi hanguskan praktek dan sistem pemerintahan yang kotor. ICW termasuk salah satu gerakan sosial yang ada di Indonesia. Strategi yang digunakan ICW dan MCW juga memiliki kesamaan, seperti dengan memanfaatkan jaringan yang dimiliki, menggunakan media sosial, penggerakan masyarakat dengan forum-forum, dan organisasi. Kesamaan visi misi dan strategi yang digunakan oleh ICW dan MCW

juga menunjukkan bahwa dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum. Namun, dapat juga dilakukan oleh masyarakat sipil. Sebagai organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu transparansi pemerintahan, Malang Corruption Watch (MCW) secara resmi berdiri sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada 31 Mei 2000, terinspirasi oleh peran Indonesia Corruption Watch (ICW) di tingkat nasional. Sebagai organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu transparansi pemerintahan, Malang Corruption Watch (MCW) secara resmi berdiri sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada 31 Mei 2000, terinspirasi oleh peran Indonesia Corruption Watch (ICW) di tingkat nasional. Dalam perjalanannya, MCW berkembang menjadi rujukan utama masyarakat dan media di Malang Raya untuk mengawasi kasus-kasus korupsi, sekaligus menjadi representasi Civil Society Organization (CSO) yang berkontribusi signifikan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih (Larasati, 2018 dalam Hilman & Nugraha, 2018). Keberadaan MCW membuktikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab negara melalui KPK, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat sipil sebagai mitra kritis dalam pengawasan kebijakan publik. Lebih lanjut, penelitian Hilman & Nugraha (2018) menegaskan bahwa gerakan anti-korupsi harus bersifat kolaboratif, melibatkan sinergi antara lembaga negara dan organisasi non-pemerintah seperti MCW. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena memungkinkan pengawasan dilakukan secara multilevel, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Dengan demikian, MCW tidak hanya berfungsi sebagai "watchdog", tetapi juga menjadi jembatan aspirasi masyarakat yang memperkuat akuntabilitas pemerintahan di Malang. Keberhasilan model ini menunjukkan bahwa pemberdayaan CSO adalah strategi kunci dalam menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan partisipatif.alam perjalanannya, MCW berkembang menjadi rujukan utama masyarakat dan media di Malang Raya untuk mengawasi kasus-kasus korupsi, sekaligus menjadi representasi Civil Society Organization (CSO) yang berkontribusi signifikan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih (Larasati, 2018 dalam Hilman & Nugraha, 2018). Keberadaan MCW membuktikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab negara melalui KPK, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat sipil sebagai mitra kritis dalam pengawasan kebijakan publik.

Lebih lanjut, penelitian Hilman & Nugraha (2018) menegaskan bahwa gerakan anti-korupsi harus bersifat kolaboratif, melibatkan sinergi antara lembaga negara dan organisasi non-pemerintah seperti MCW. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena memungkinkan pengawasan dilakukan secara multilevel, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Dengan demikian, MCW tidak hanya berfungsi sebagai "watchdog", tetapi juga menjadi jembatan aspirasi masyarakat yang memperkuat akuntabilitas pemerintahan di Malang. Keberhasilan model ini menunjukkan bahwa pemberdayaan CSO adalah strategi kunci dalam menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan partisipatif.

KESIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah dipaparkan diatas, Malang Corruption Watch (MCW) sebagai lembaga swadaya masyarakat yang berperan penting dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di kota Malang, Melalui berbagai kegiatan advokasi, riset, pendidikan publik dan kampanye anti korupsi, MCW tidak hanya mengedepankan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah tetapi juga mengedukasi masyarakat agar lebih aktif terlibat dalam proses demokrasi. Partisipasi aktif Malang Corruption Watch MCW dalam memerangi korupsi di tingkat lokal mencerminkan pentingnya keberadaan masyarakat sipil dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, penelitian ini membuktikan bahwa keterlibatan organisasi seperti Malang Corruption Watch (MCW) dapat mendorong perubahan budaya politik, khususnya dalam memperkuat peran warga negara sebagai pengawas pemerintahan.

Dengan adanya Malang Corruption Watch (MCW), masyarakat kota Malang diharapkan semakin sadar akan hak dan kewajibannya dalam mengawal pemerintahan, sehingga tercipta budaya politik yang lebih terbuka dan bertanggung jawab. Peram strategis masyarakat sipil

seperti Malang Corruption Watch (MCW) tidak hanya relevan di tingkat lokal tetapi juga menjadi contoh bagi gerakan antikorupsi di daerah lain.

Ucapan Terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Malang Corruption Watch (MCW) yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan informasi penting dalam proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Prof. Dr. Sri Untari, M. Si. Selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Politik dan SPI, yang telah memberikan arahan dan dukungan akademik selama proses penulisan.

Terima kasih juga ditujukan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, dan masukan selama penyusunan artikel ini. Tanpa kontribusi mereka, artikel ini tidak akan terselesaikan dengan baik.Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi dalam pengembangan kajian masyarakat sipil dan gerakan antikorupsi di Indonesia.

REFERENSI

Aryanda, D. (2023). Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Mengawal Kebijakan Pendidikan Kota Malang.

Bhirawa, S. (2023). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menunjang Pelaksanaan Good Governance (Studi Pada Malang Corruption Watch).

Hilman, Y. A., & Nugraha, H. S. (2018). Gerakan Anti Korupsi Malang Corruption Watch. SOSIOGLOBAL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, 2(2), 11–24.

Larasati, D. (2018). Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil: Malang Corruption Watch. Sospol, 4(1), 168–184. (Dikutip dalam Hilman & Nugraha, 2018).

Pelor, S., & Heliany, I. (2018). Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap pembangunan politik dan demokrasi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum, 3(1), 132–146.

Sekarsari, W. (2021). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Melakukan Kontrol Publik terhadap Kebijakan Tata Ruang di Kota (Studi Kasus pada Malang Corruption Watch).

Ulzikri, A. R. (2020). Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal dan Pemerintah Daerah Terhadap Sumberdaya Alam (Discourse Analisis dalam Kasus Eksploitasi Pasir di Perairan Krakatau Lampung Selatan). *Jurnal Public Policy*, *6*(2), 56. https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.1994